

INTISARI

Proses pencairan dana APBN di Indonesia adalah bagian terpenting dalam tahapan pelaksanaan anggaran. Pencairan dana APBN terjadi pada proses pengajuan tagihan dari kementerian lembaga kepada KPPN selaku kuasa BUN. Proses pencairan dana APBN yang terjadi di KPPN selama ini selalu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran kementerian lembaga. Proses yang berbelit-belit, waktu yang lama dan tidak modern dianggap sebagai penyebab kementerian lembaga kesulitan dalam proses pengajuan tagihan. Perubahan sistem dalam proses pencairan menggunakan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) diharapkan dapat mengefektifkan proses pencairan dana APBN. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pencairan dana APBN dengan penerapan SPAN serta mengetahui faktor yang paling mempengaruhi efektivitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah KPPN Jakarta II karena merupakan kantor pelayanan yang pertama menjadi piloting bagi penerapan SPAN di seluruh Indonesia.

Melalui analisis kualitatif yang dilakukan penulis melalui data dokumentasi, kepustakaan obeservasi dan wawancara dihasilkan bahwa tingkat efektivitas pencairan dana APBN dengan penerapan SPAN cukup efektif dalam hal kuantitas pencairan berupa Jumlah realisasi anggaran yang cenderung meningkat dan Jumlah SP2D yang diterbitkan KPPN Jakarta II yang turun. Sedangkan Pada kualitas pencairan dana APBN yang diukur berdasarkan pada jumlah pengembalian/penolakan SPM dan Jumlah retur SP2D diketahui masih sangat tinggi sehingga dianggap tidak efektif. Serta Durasi waktu pencairan dana APBN yang sangat cepat khususnya dalam hal pemindahbukuan/transfer dana kepada penerima manfaat dapat disimpulkan sangat efektif. Walaupun dalam hal penyelesaian SP2D masih sangat lambat jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Penelitian juga menghasilkan faktor petunjuk operasional (SOP) dan sistem aplikasi serta perangkat keras sebagai faktor yang paling mempengaruhi efektivitas pencairan dana APBN. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah penyampaian informasi dan komunikasi, sumberdaya manusia serta pemberian penghargaan dan sanksi yang tidak sesuai tanggungjawab.

Kata Kunci : Efektivitas, Pencairan dana, APBN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

ABSTRACT

The process of disbursement of state funds in Indonesia is the most important part in the phase of implementation of the budget. Disbursement of state funds occurred in the process of filing the bill of the ministry / agency to the Treasury Office (KPPN) as the authorized of BUN. The process of disbursement of state funds that occurred in the Treasury Office (KPPN) has always been one of the factors causing delays absorption by ministries / agencies. Process convoluted, long time and not modern, regarded as the cause of the ministries / agencies difficulty in the process of filing the bill. Changes to the system in the process of disbursement of state funds using SPAN (Treasury and the State Budget System) is expected to streamline the process of disbursement of state funds. The research objective was to assess the effectiveness of the disbursement of state funds with application of SPAN and to know the factors that most influence the effectiveness.

This study uses an explanatory descriptive with qualitative approach. Informants were selected based on the purpose of the study with data collection through interview, observation and documentation. The research location is KPPN Jakarta II because it is the first service office into piloting the application SPAN throughout Indonesia.

Through qualitative analysis conducted by the author through the data documentation, literature observation and interviews generated that the level of effectiveness of the disbursement of state funds by the application SPAN quite effective in terms of quantity Total disbursement in the form of budget realization are likely to increase and amount SP2D published KPPN Jakarta II were dropped. While the disbursement of state funds on quality measured based on the number of return / rejection of SPM and SP2D unknown amount of returns is still very high so it is considered ineffective. As well as the duration of the disbursement of state funds very quickly, especially in the case of transfer / transfer of funds to beneficiaries can be concluded very effective. Although in terms of completion SP2D still slower than the previous system. The research also found that Standard Operating Procedures (SOP) factors and application systems and hardware as factors that most influenced the effectiveness of the disbursement of state funds. Other factors that also affected that is the delivery of information and communications, human resources, as well as reward and punishment is not appropriate with responsibilities that must be carried.

Keywords: Effectiveness, disbursement of funds, the state budget, Treasury and The State Budget System